

Katalog/Catalog: 9102067.14



Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI RIAU

www.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI RIAU



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
SENSUS EKONOMI 2016 PROVINSI RIAU**

No. ISBN: 978-602-5665-22-6

No. Publikasi: 14560.1805

No. Katalog: 9102067.14

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm

Jumlah Halaman: vi + 30 halaman

Naskah: Seksi Analisis Statistik dan Lintas Sektor BPS Provinsi Riau

Penyunting: Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik

Desain Kover oleh: Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Tata Letak: Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan pendaftaran lengkap atau *listing* Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Pekanbaru, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aden Gultom', written over a blue horizontal line.

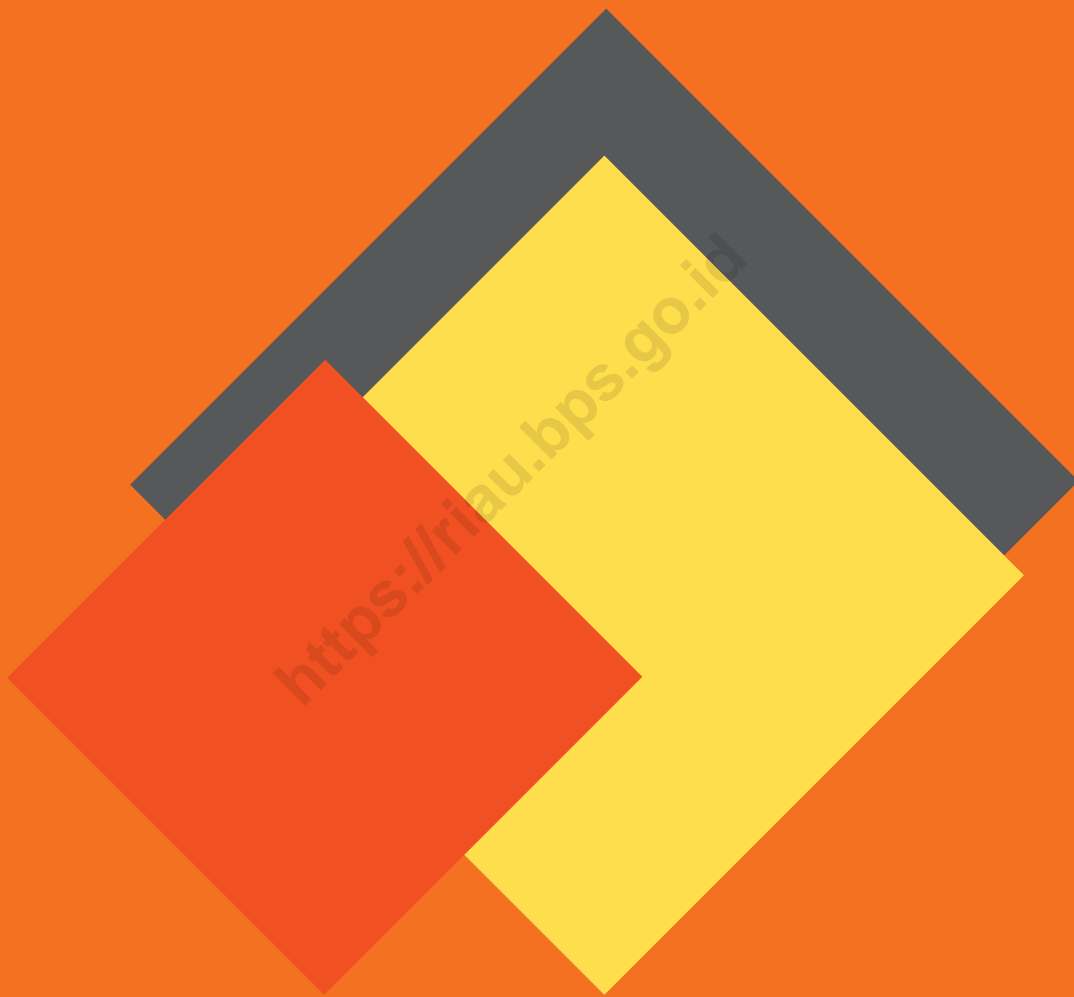
Aden Gultom



<https://riau.bps.go.id>

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | III |
| DAFTAR ISI | V |
| PENDAHULUAN | 1 |
| UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA | 3 |
| UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK | 7 |
| PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA | 11 |
| PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN | 17 |
| KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN | 21 |
| PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG | 27 |



<https://riau.bps.go.id>

Pendahuluan

Dunia usaha Riau pada saat ini masih didominasi oleh usaha yang tergolong dalam usaha mikro kecil (UMK). Dari hasil Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai 509 ribu atau 98,26 persen dari total usaha nonpertanian di provinsi Riau. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Riau lebih dari 1,24 juta orang atau sekitar 67,68 persen dari total tenaga kerja di luar sektor pertanian di provinsi Riau. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Keunggulan ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal sendiri atau tidak ditopang pinjaman dari bank. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Riau, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Untuk melihat potensi dan Kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu dilakukan analisis kinerja UMK. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi Pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi sehingga mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



<https://riau.bps.go.id>

**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
INDONESIA**

Bagian

1

<https://riau.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Riau. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Riau mencapai 98,29 persen dari total jumlah usaha nonpertanian. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 267 ribu usaha atau mencapai 52,48 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sebesar 19,09 persen dan 9,17 persen.

Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Riau masih menjadi

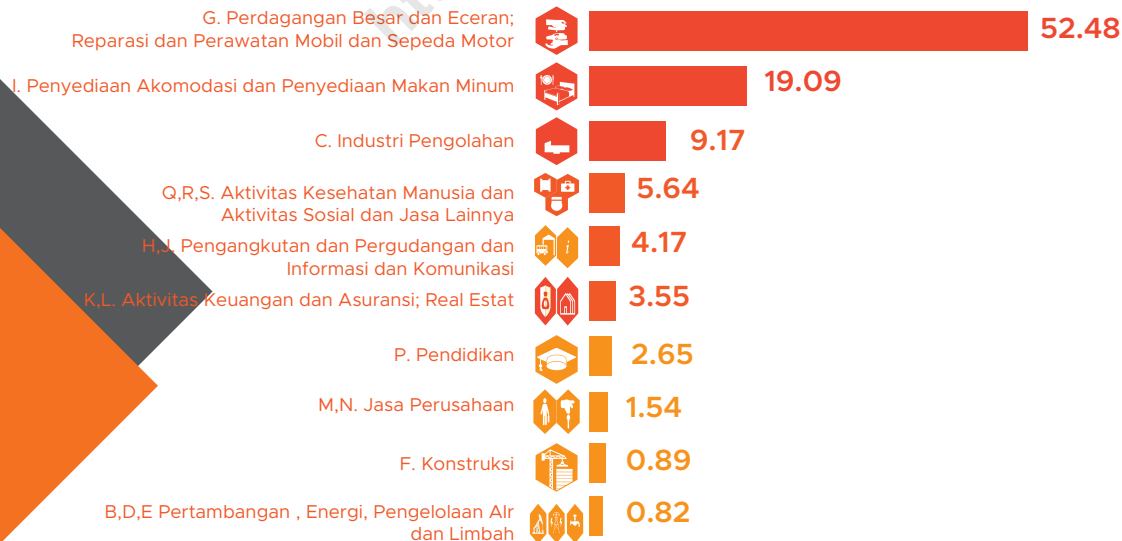
konsentrasi UMK. Jumlah UMK di kota ini sekitar 19,47 persen dari jumlah UMK di Provinsi Riau. Selain Kota Pekanbaru, sekitar 13,50 persen UMK berada di Kabupaten Kampar dan sisanya menyebar di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
PROVINSI
RIAU

Gambar 1.1.
Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi
Di Provinsi Riau, 2017



Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Nonpertanian Menurut Kategori di Provinsi Riau, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2017

| Pulau | Jumlah | Persentase (%) |
|-------------------|----------------|----------------|
| Kuantan Singingi | 30.353 | 5,96 |
| Indragiri Hulu | 36.316 | 7,13 |
| Indragiri Hilir | 44.654 | 8,77 |
| Pelalawan | 28.145 | 5,53 |
| Siak | 32.740 | 6,43 |
| Kampar | 68.731 | 13,50 |
| Rokan hulu | 41.330 | 8,12 |
| Bengkalis | 43.253 | 8,49 |
| Rokan Hilir | 43.152 | 8,47 |
| Kepulauan Meranti | 15.051 | 2,96 |
| Pekanbaru | 99.175 | 19,47 |
| Dumai | 26.361 | 5,18 |
| Total | 509.252 | 100,00 |



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2



Jumlah UMK yang sangat besar di Provinsi Riau tentunya akan berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2017, pengangguran di Provinsi Riau mencapai 6,22 persen, terbanyak pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai lebih dari 10,86 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran ini salah satu disebabkan rendahnya soft skill lulusan SMK khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji. Selain SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencapai hampir 9,21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah.

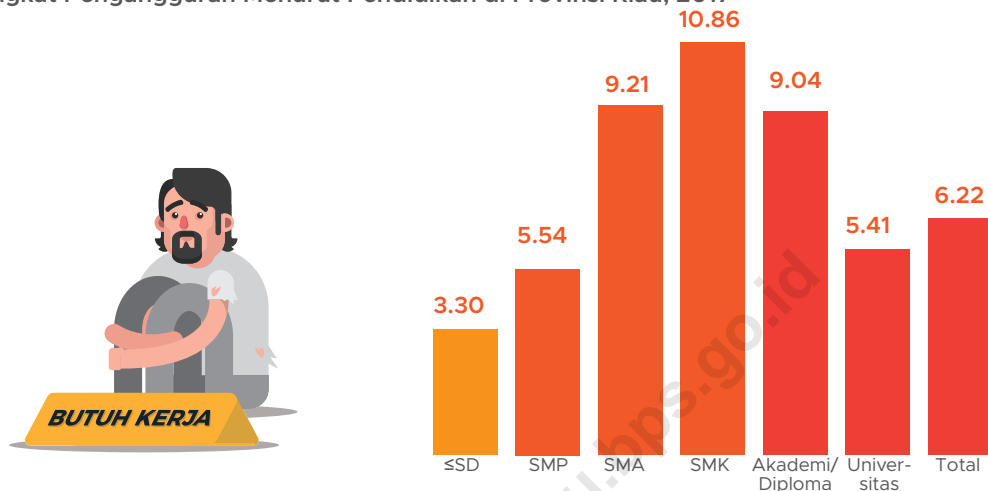
Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (skill) tinggi. Data SE2016 memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 1,24 juta orang atau sekitar 67,68 persen dari total

tenaga kerja di luar lapangan usaha pertanian di Provinsi Riau.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) sekitar 547 ribu jiwa atau mencapai 44,19 persen dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan Pendidikan (kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga setelah usaha dengan kategori G. Rasio tenaga kerja per usaha di bidang Pendidikan (Kategori P) adalah yang terbesar yaitu 11 tenaga kerja per usaha dan secara umum rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Provinsi Riau hanya sebesar 2 pekerja per usaha.

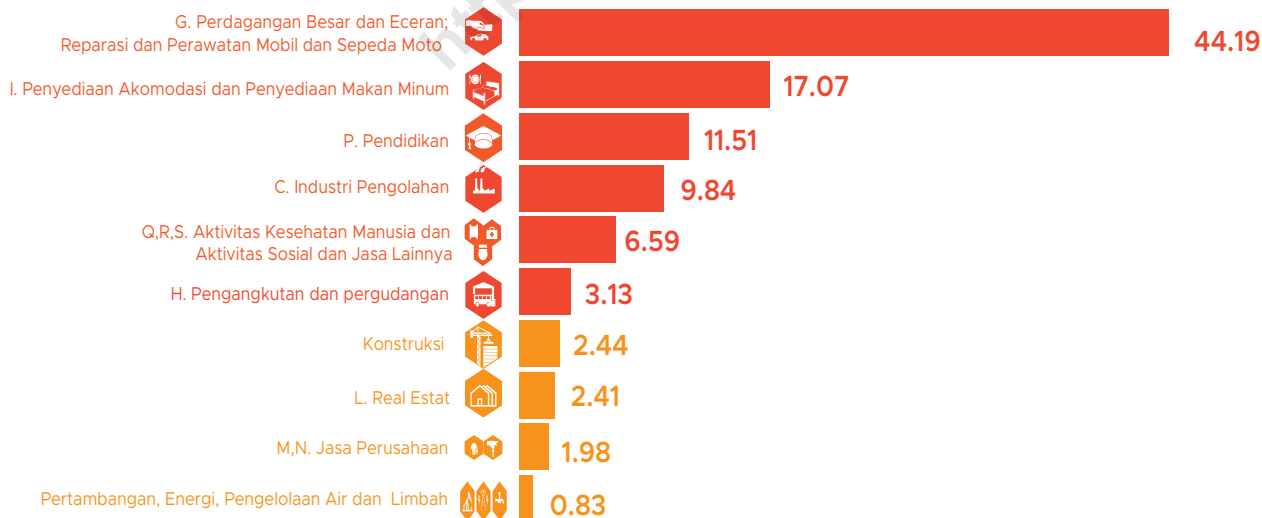
**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan di Provinsi Riau, 2017



Sumber: Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Riau, 6 November 2017

Gambar 2.3.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori di Provinsi Riau, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian
Menurut Kategori di Provinsi Riau, 2017

| Kategori | Jumlah Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| B,D,E.Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik , Gas/ Uap Air, dan Pengelolaan Air | 4.166 | 10.238 | 4 |
| C.Industri Pengolahan | 46.717 | 121.830 | 3 |
| F.Konstruksi | 4.519 | 29.872 | 7 |
| G.Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor | 267.247 | 547.114 | 2 |
| H,J.Pengangkutan dan pergudangan dan Informasi Komunikasi | 21.255 | 38.788 | 2 |
| I.Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum | 97.193 | 211.339 | 2 |
| K,L.Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Real Estate | 18.085 | 30.242 | 5 |
| M,N.Jasa Perusahaan | 7.836 | 24.543 | 3 |
| P.Pendidikan | 13.509 | 142.511 | 11 |
| Q,R,S.Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dan Jasa Lainnya | 28.725 | 81.577 | 3 |
| Jumlah | 509.252 | 1.238.054 | 2 |



**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://riau.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penerapan tenaga kerja UMK yang besar di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Riau, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 89,72 persen. Sementara itu mayoritas UMK juga belum menggunakan internet dan komputer. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk

mendesain produk, pemasaran produk dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk UMK, Namun demikian, hanya kurang dari 10 persen UMK yang menggunakan internet dan kurang dari 8 persen yang menggunakan komputer.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, upaya ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya kurang dari 8 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara lapangan usaha Nonpertanian di Riau, UMK pada kategori Pendidikan yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel yang status badan hukum, adanya laporan keuangan, dan penggunaan komputer. UMK Pendidikan tercatat mempunyai persentase tertinggi di antara kategori lainnya. Demikian pula dengan kemitraan, kategori ini paling banyak persentasenya yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lainnya.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum di
Provinsi Riau, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha di
Provinsi Riau, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha di Provinsi Riau, 2017



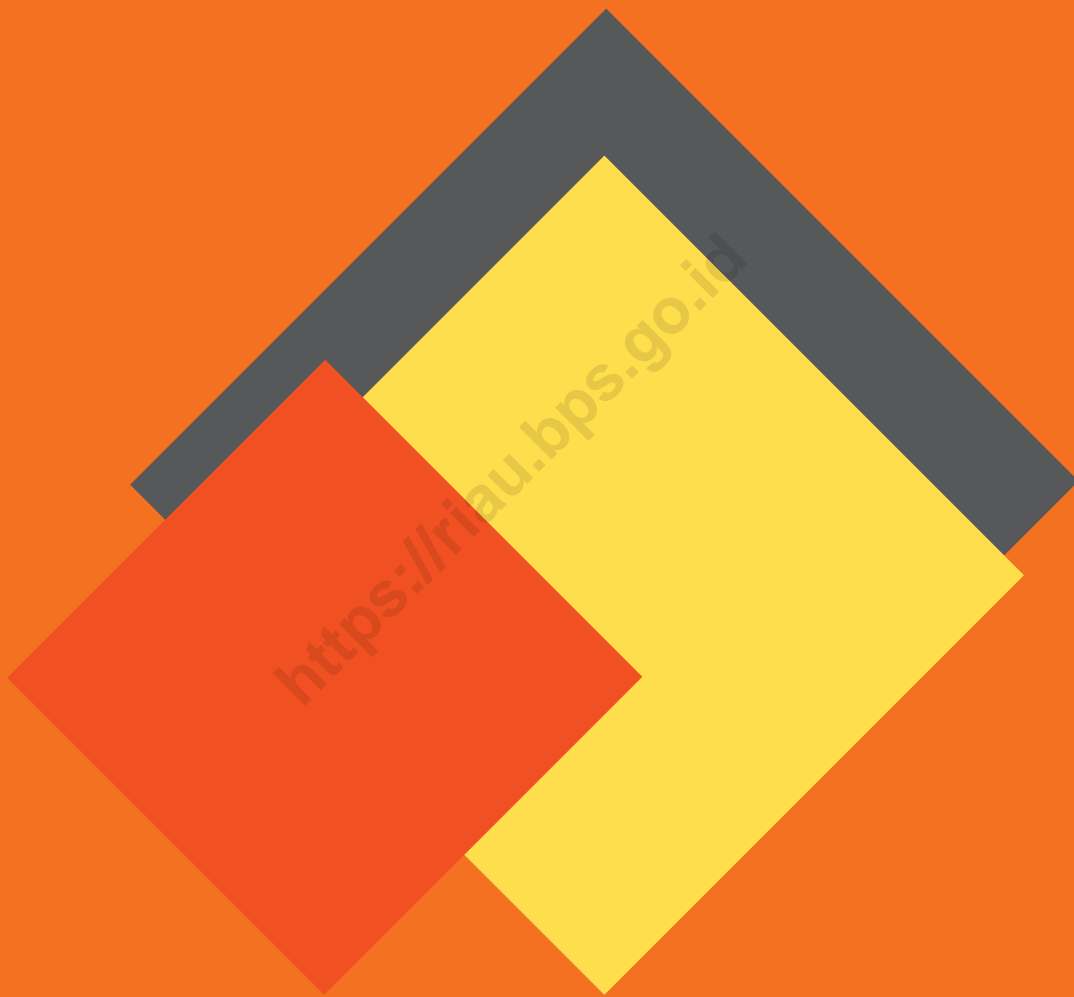
Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan di Provinsi Riau, 2017



Tabel 3.
 Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Menggunakan Komputer, Menggunakan Internet, dan Menjalिन Kemitraan di Provinsi Riau, 2017

| Kategori | Berbadan Hukum | Mempunyai Laporan Keuangan | Menggunakan Komputer | Menjalिन Kemitraan |
|---|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| B,D,E.Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik , Gas/Uap Air, dan Pengelolaan Air | 5,16 | 9,00 | 11,59 | 5,62 |
| C.Industri Pengolahan | 9,85 | 4,99 | 8,68 | 10,21 |
| F.Konstruksi | 22,86 | 22,26 | 22,68 | 13,68 |
| G.Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor | 7,41 | 3,73 | 6,62 | 9,04 |
| H,J.Pengangkutan dan pergudangan dan Informasi Komunikasi | 10,03 | 22,99 | 25,75 | 10,22 |
| I.Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum | 3,89 | 1,18 | 3,44 | 2,41 |
| K,L.Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Real Estate | 8,37 | 8,27 | 5,71 | 2,24 |
| M,N.Jasa Perusahaan | 25,47 | 45,74 | 39,41 | 15,20 |
| P.Pendidikan | 81,83 | 66,80 | 55,89 | 16,00 |
| Q,R,S.Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dan Jasa Lainnya | 21,60 | 12,55 | 15,83 | 7,24 |





<https://riau.bps.go.id>

**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

Bagian

4

Salah satu faktor untuk keberhasilan usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu pelaku usaha. Sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 22,33 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G)..

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 38,15 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih

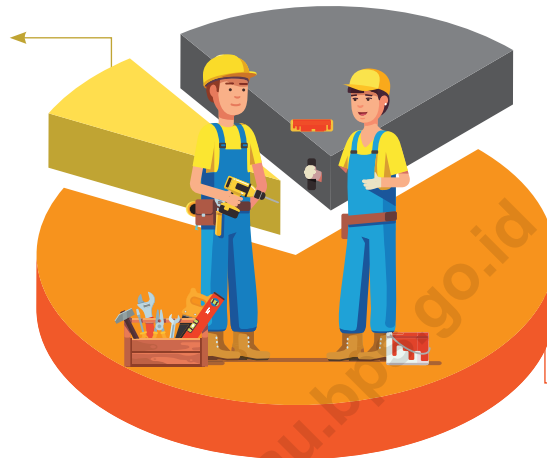
berlakunya *stereotype* bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK sudah tinggi. Lebih dari sepertiga pengelola berpendidikan SMA, paling besar diantara jenjang pendidikan lainnya. Pengelola dengan pendidikan SD juga cukup besar mencapai sekitar seperempat. Masih terdapatnya pendidikan pengelola UMK yang rendah menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti, misalnya dengan memberikan pelatihan. Sayangnya, Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pelaku UMK yang pernah mengikuti pelatihan hanya 5,05 persen.

PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN

Gambar 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Pekerja di Provinsi
Riau, 2017

7,77%
Tidak Tetap/
Harian/
Outsourcing



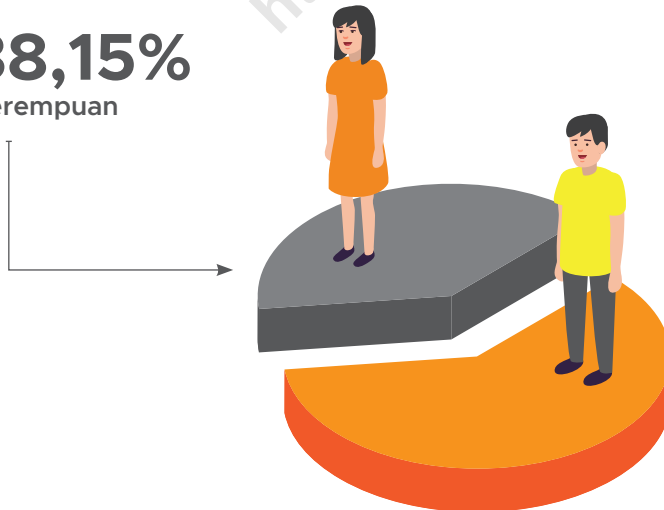
22,33%
Tidak
Dibayar

69,90%
Tetap dan
Kontrak

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin di Provinsi
Riau, 2017

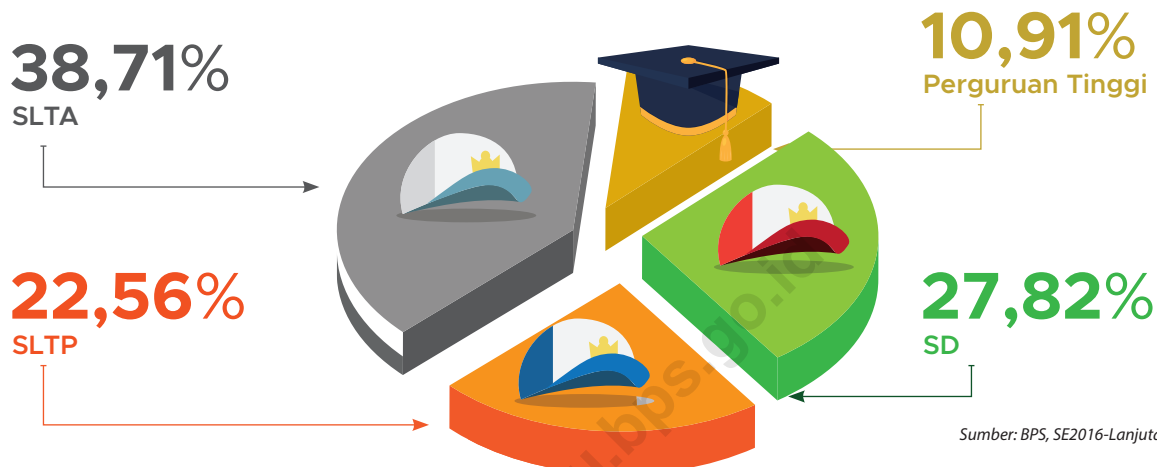
38,15%
Perempuan



61,85%
Laki-Laki

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan di Provinsi Riau, 2017



Tabel 4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja di Provinsi Riau, 2017

| Kategori | Tetap dan Kontrak | Tidak Tetap/Harian/ Outsourcing | Tidak Dibayar |
|--|-------------------|------------------------------------|---------------|
| B,D,E.Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air, dan Pengelolaan Air | 62,49 | 22,39 | 15,12 |
| C.Industri Pengolahan | 64,52 | 15,64 | 19,84 |
| F.Konstruksi | 36,16 | 61,29 | 2,55 |
| G.Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor | 66,03 | 4,87 | 29,09 |
| H,J.Pengangkutan dan pergudangan dan Informasi Komunikasi | 75,75 | 7,08 | 17,17 |
| I.Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum | 64,93 | 3,58 | 31,49 |
| K,L.Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Real Estate | 83,15 | 1,37 | 15,48 |
| M,N.Jasa Perusahaan | 66,10 | 21,37 | 12,52 |
| P.Pendidikan | 94,74 | 3,93 | 1,33 |
| Q,R,S.Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dan Jasa Lainnya | 80,13 | 10,08 | 9,79 |
| Total | 69,90 | 0,15 | 22,33 |

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://riau.bps.go.id>

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

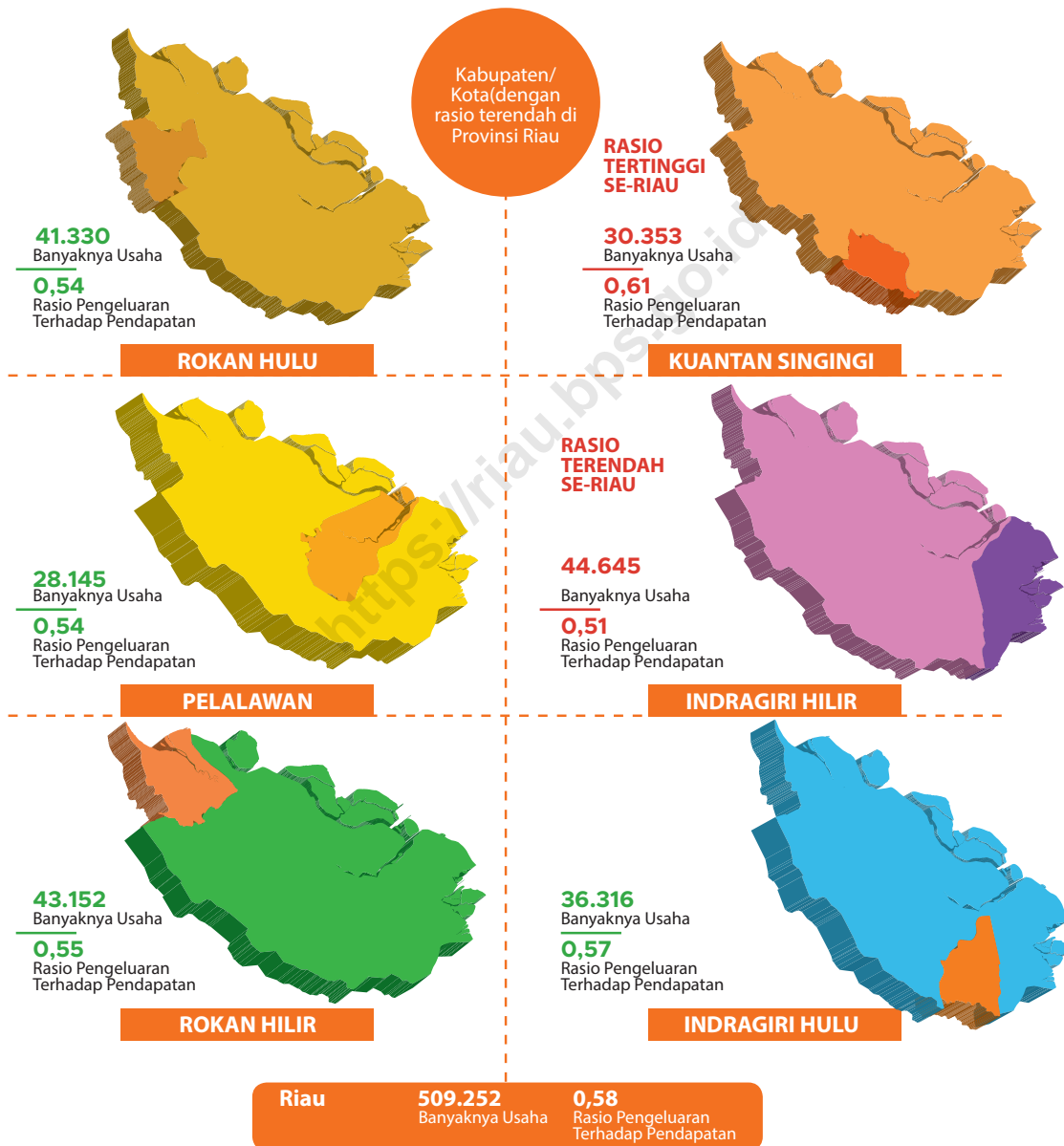
Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba UMK menunjukkan capaian yang positif meskipun secara umum dipandang mengalami penurunan. Lebih dari sepertiga UMK di Provinsi Riau menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat, UMK di Provinsi Riau mampu menghasilkan pendapatan mencapai lebih dari Rp 115 triliun.

Selain laba usaha, rasio *cost to income* juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Berdasarkan rasio *cost to income* kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat terlihat bahwa UMK di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang paling profitable dengan rasio 0,51. UMK di kabupaten ini mampu mengais keuntungan hingga nyaris dua kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan rasio 0,61.

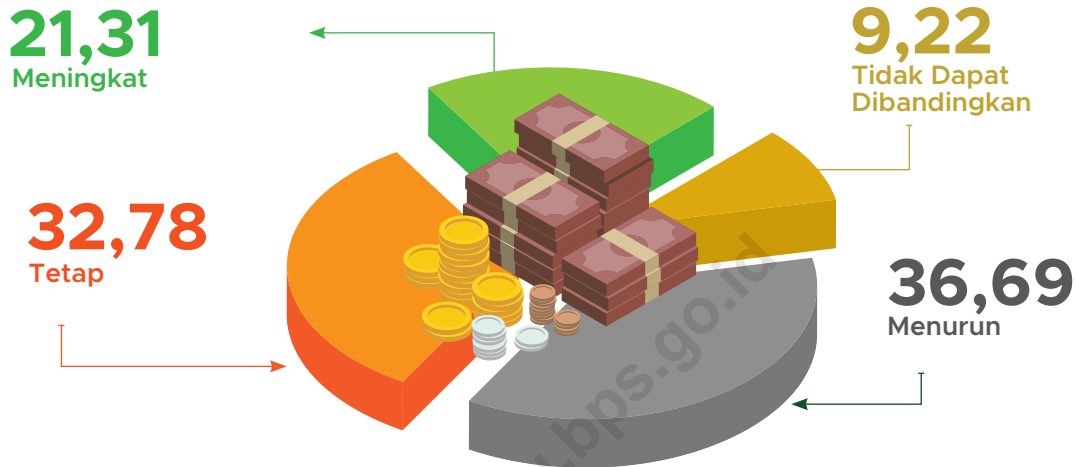
Kategori F (Konstruksi) merupakan kategori lapangan usaha yang memberikan rata-rata balas jasa per pekerja paling tinggi yaitu sebesar 25,08 juta rupiah per pekerja. Sedangkan rata-rata balas jasa per pekerja paling rendah diberikan oleh kategori **B, D, E** (Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air, dan Pengelolaan Air) dengan rata-rata balas jasa 15,15 juta rupiah per pekerja.

Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, kategori F (Konstruksi) dan G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) untuk sektor UMK merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,48 dan 0,50. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar dua kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi disematkan pada kategori pendidikan dengan rasio mencapai 0,89.

Gambar 6.1.
Peta Sebaran UMK Per Kabupaten/Kota Menurut Kinerja Keuangan
di Provinsi Riau, 2017

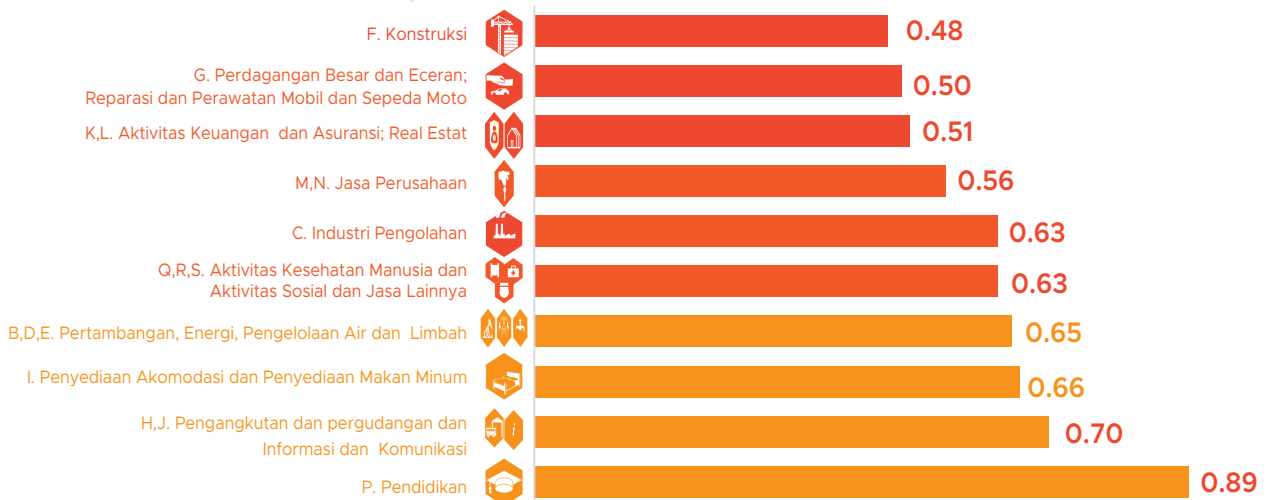


Gambar 6.2.
Persentase UMK Menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015 di Provinsi Riau



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.3.
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan UMK Menurut Kategori di Provinsi Riau, 2017

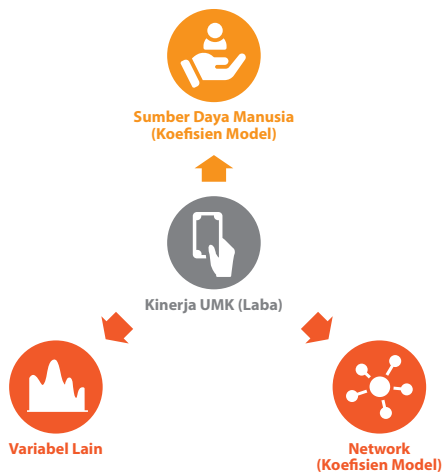


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.4.
Rata-Rata Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori di Provinsi Riau, 2017 (Ribu Rupiah)

| Kategori | Balas Jasa |
|---|------------|
| B,D,E.Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik , Gas/Uap Air, dan Pengelolaan Air | 15.150 |
| C.Industri Pengolahan | 15.957 |
| F.Konstruksi | 25.081 |
| G.Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor | 15.493 |
| H,J.Pengangkutan dan pergudangan dan Informasi Komunikasi | 15.563 |
| I.Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum | 15.344 |
| K,L.Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Real Estate | 15.915 |
| M,N.Jasa Perusahaan | 15.872 |
| P.Pendidikan | 22.930 |
| Q,R,S.Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dan Jasa Lainnya | 17.338 |
| Total | 17.939 |

Gambar 6.5.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha UMK





<https://riau.bps.go.id>

**PROSPEK
UMK DI
MASA
MENDATANG**

Bagian

6

<https://riau.bps.go.id>

RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha yang tergolong UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 40,61 persen.

Dalam menghadapi persaingan di abad ke-21, UKM dituntut untuk dapat memenuhi permintaan konsumen yang makin spesifik, berubah dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan harga yang murah. Namun dalam perkembangannya, UMK banyak menghadapi berbagai kendala. Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Berdasarkan data SE2016-Lanjutan terlihat bahwa 82% UMK mengalami kendala/kesulitan selama tahun 2016. Kendala usaha terbanyak yang dialami oleh UMK adalah permodalan sebesar 66,73%

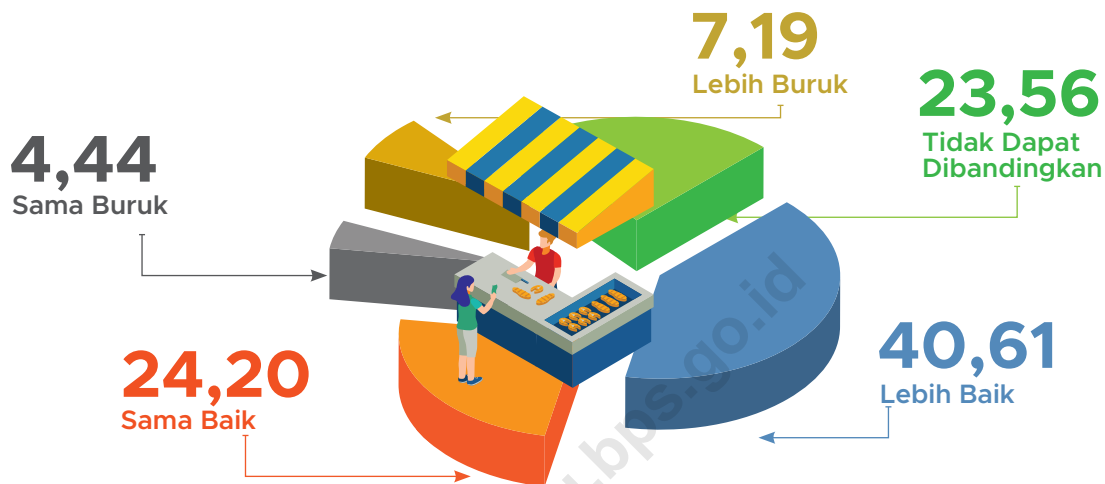
UMK dapat dikatakan minim akses terhadap lembaga keuangan karena disebabkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri/ modal individu dalam menjalankan usahanya, dan terkadang mereka terjebak

dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap pembiayaan formal. Berdasarkan data SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa akses permodalan UMK terhadap selain Lembaga Keuangan yaitu sebesar 88,59%, dan sisanya 11,41% yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Informasi ini sangat berguna bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan penyediaan akses modal terhadap UMK, terutama untuk kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-20, yaitu peningkatan daya saing UMK agar berkembang secara berkelanjutan dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Alasan UMK tidak menjadikan Lembaga Keuangan sebagai pemberi modal usaha tertinggi berada di alasan merasa belum perlu untuk mengajukan kredit dan lainnya, yaitu sebesar 46,54%. Sedangkan bagi pengusaha yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan/mendapatkan kredit adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak.

**PROSPEK
UMK DI MASA
MENDATANG**

Gambar 7.1.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK di Provinsi Riau, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 7.2.
Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan di Provinsi Riau, 2017





<https://riau.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru
Telp : (0761) 23042, Fax : (0761) 23042
Homepage : <http://www.riau.bps.go.id> E-mail : riau@bps.go.id

ISBN 978-602-5665-22-6



9 786025 665226